

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Aulia Rizka Kusuma
aulia.kusuma5@yahoo.co.id
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to test the influence of the characteristic of the local government which is proxy by the size of local government, prosperity, the dependence level on central government, leverage, and local expenditure to the financial performance of the local government based on the performance efficiency ratio. The population is all cities/districts local government in East Java Province in 2013-2015 periods. The sample collection technique has been carried out by using purposive sampling method and based on the predetermined criteria so 35 cities/districts have been selected as samples. The secondary data has been carried out by using LKPD from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) East Java Province Representative. The analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions analysis. The data examination has been carried out by using SPSS software 23.0 version. The result of R^2 test shows that the independent variable is 35,5% and is 64,5% has been influenced by other variables which are not included in the research. The result of t test shows that prosperity and local expenditure has positive influence to the financial performance of local government based on the performance efficiency ratio whereas the size of local government size, the dependence level on central government, and leverage do not have any influence to the financial performance of local government based on the performance efficiency ratio.

Keywords: The characteristics of local government, financial performance of local government, performance efficiency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diprosikan dengan ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *leverage*, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2015. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 23.0. Hasil dari Uji R^2 menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 35,5% dan 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa kemakmuran dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Kata kunci: Karakteristik pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, efisiensi kinerja.

PENDAHULUAN

Lahirnya era reformasi pada tahun 1998 akibat adanya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 telah membawa perubahan bagi Indonesia. Salah satunya adalah perubahan sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh pengambilan keputusan diambil oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Dengan berkurangnya campur tangan pemerintah pusat diharapkan daerah dapat membiayai

pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangannya sendiri. Pada tahun 1999 menjadi awal dari sistem desentralisasi di Indonesia.

Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah terutama pada Kabupaten/Kota sangat berperan penting atas jalannya pelaksanaan otonomi. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memahami kondisi dan permasalahan daerahnya secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Dengan demikian, pembangunan dan pelayanan akan berjalan dengan baik dan merata.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional semakin besar dan dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemerintah Daerah. Hal tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat laporan keuangan yang bersifat transparansi dan akuntabel agar tercapai kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk beberapa aspek yakni, aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi dan pasar internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan *stakeholders*, dan waktu (Bastian, 2006:276).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan kepada publik atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam mendukung pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah menyusun anggaran keuangan yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Anggaran dalam Pemerintah Daerah dapat disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / jasa yang mungkin akan terjadi pada tahun anggaran yang berkenaan. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan APBD yang baik harus berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:4).

Wenny (2012) melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan faktor pendapatan asli daerah dan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu karakteristik pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dirumuskan adalah:

(1) Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja? (2) Apakah kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja? (3) Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja? (4) Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja? (5) Apakah belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja?.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *leverage*, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori utama yang menjadi dasar mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan dengan teori agensi. Jensen, 1976 (dalam Nugroho, 2014) menyatakan bahwa hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Prinsip utama teori ini menyatakan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (disebut prinsipal) dan yang menerima wewenang (disebut agen). Dalam suatu hubungan kerja, yakni antara investor (sebagai prinsipal) dengan manajer (sebagai agen). Pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik antara prinsipal dengan agen. Agen mempunyai tanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun agen juga berkepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Hal ini yang menimbulkan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik juga dapat terjadi karena pemerintah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat tidak bertindak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Berdasarkan teori agensi pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 mendefinisikan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pengawasan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdiri pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa opini, temuan audit serta simpulan dalam bentuk rekomendasi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Laporan keuangan adalah bentuk penyajian informasi keuangan suatu entitas selama periode tertentu yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut. Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelola

sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen mengetahui kondisi entitas tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi sumber daya ekonomi (aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada periode tertentu yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif adalah salah satu alat untuk dapat mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno, 2013).

Karakteristik Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan wajib dan pilihan), tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dengan demikian, LPPD pemerintah daerah kabupaten/kota sangat tergantung dengan tanggungjawab dan karakteristik masing-masing pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Poerwadarminta, 2006 (dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011) menyatakan bahwa karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Maka dapat disimpulkan karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain.

Lesmana (2010) menyatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otorisasi administrasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam suatu LKPD dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah yang bersangkutan. Sumarjo (2010) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diterapkan pada sektor publik, dimana karakteristik daerah dapat menjadi indikator yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

1. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran adalah suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Jika objek tertentu dikaitkan dengan instansi atau organisasi, ukuran dapat dilihat secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. Tetapi pengukuran suatu organisasi atau instansi tidak harus berdasarkan pada fisiknya saja, seperti besar dan luas kantor instansi tersebut karena tidak ada tolok ukur yang pasti tentang hal tersebut (Rachmawati, 2016).

Sudarmadji dan Sularto, 2007 (dalam Nugroho, 2014) menyatakan bahwa besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka akan semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan

kegiatan operasional dan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kemudahan dibidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan.

Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kerjanya (Sudarsana, 2013).

2. Kemakmuran (*Wealth*)

Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda (Kusumawardani, 2012). Kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim dan Kusufi, 2012:101).

3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Prasetya, 2013 (dalam Saraswati, 2014) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan dana alokasi umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari dana perimbangan. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah (Julitawati et al., 2012).

4. *Leverage*

Kewajiban atau hutang merupakan pengorbanan-pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aset atau jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang (Halim, dan Kusufi, 2012:59). Bastian (2006:104) menyatakan bahwa kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu dan dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa *Leverage* adalah perbandingan antara utang dan modal.

Sesotyaningtyas, 2012 (dalam Minarsih, 2015) mengungkapkan bahwa didalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan

oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini digunakan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang.

5. Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2006:274) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Sari, 2016).

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordawati dan Hertianti, 2010:158). Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Bastian, 2006:275).

Mardiasmo (2009:121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian Pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2009:121).

Mahsun et al. (2006:151) menyatakan bahwa pengukuran kinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain: 1) Kelompok Masukan (*Input*), 2) Kelompok Proses (*Process*), 3) Kelompok Keluaran (*Output*), 4) Kelompok Hasil (*Outcome*), 5) Kelompok Manfaat (*Benefit*), 6) Kelompok Dampak (*Impact*).

Mardiasmo (2009:131) menyatakan bahwa *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Berikut ini akan dijelaskan mengenai konsep *value for money* atau yang dikenal dengan 3E (ekonomi, efisiensi, efektivitas).

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*).

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan utama program kerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Total aset yang besar dalam pemerintahan akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional serta mempermudah dalam memberikan pelayanan yang memadai. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar bagi pemerintah daerah. Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyatakan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah diharapkan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₁ : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Pengaruh Kemakmuran (*Wealth*) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kemakmuran daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah sebagai bentuk pelayanan publik. Saraswati (2014) menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD maka kebutuhan daerah akan terpenuhi dan kualitas pelayanan publik meningkat. Peningkatan kualitas pelayanan publik mencerminkan kinerja pemerintah yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₂ : Kemakmuran (*Wealth*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat ketergantungan pemerintah pusat dapat dilihat dari Dana Alokasi Umum (DAU). Julitawati et al. (2012) menyatakan bahwa DAU merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAU yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin buruk. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₃ : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Leverage merupakan perbandingan antara utang dan modal. Kewajiban atau utang adalah pengorbanan-pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aset atau jasa kepada entitas lain di masa yang akan datang. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh suatu entitas tersebut. Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa semakin besar *leverage* maka semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah

H₄ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

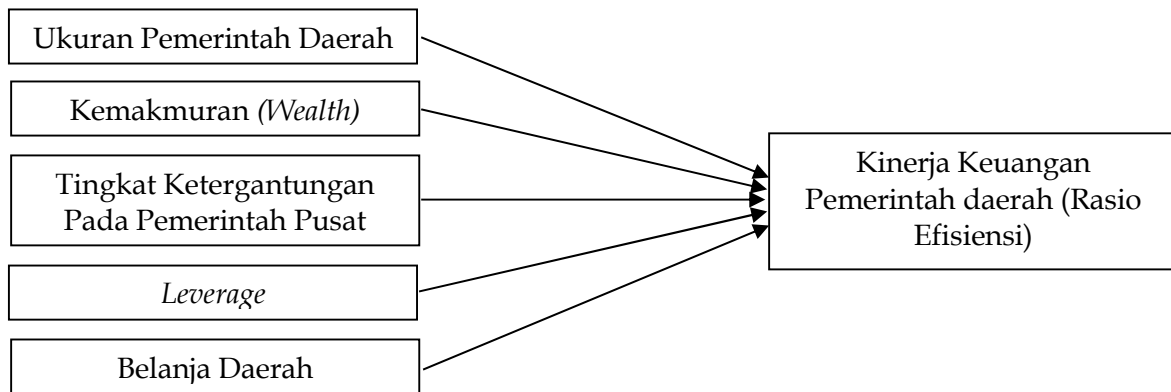
Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang menjadi pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Noviyanti dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa banyaknya belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah dapat mempermudah pemerintah daerah tersebut untuk menjalankan program pembangunan yang telah dirancang di daerahnya. Pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Mustikarini dan Fitriyani (2012), menyatakan bahwa semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₅ : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Model Penelitian

Model Penelitian untuk penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yakni kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja dan 5 variabel independen yakni ukuran pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *leverage*, serta belanja daerah. Adapun sebagai objek penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur dan tempat penelitian adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, Total Realisasi Belanja dan Total Realisasi Pendapatan serta Laporan Posisi Keuangan untuk mendapatkan Total Aset, Total Utang, dan Total Modal pada periode tahun 2013-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data dokumenter. Data dokumenter merupakan jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data laporan posisi keuangan dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013-2015 yang telah diaudit yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Terdapat enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen (terikat) dan lima variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yakni:

1. Variabel Dependen

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun et al., 2006:145).

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi merupakan komponen penting yang dapat memberikan motivasi dan arah serta umpan balik perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi. Nordiawan dan Hertianti (2010:161) mendefinisikan efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Semakin kecil rasio, maka semakin baik tingkat efisiensinya, begitu pula sebaliknya. Semakin besar rasio, maka akan semakin buruk tingkat efisiensinya. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dan penerimaan daerah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri, 1996 (dalam Minarsih, 2015)

2. Variabel Independen

- a. Ukuran Pemerintah Daerah, dapat menunjukkan besar kecilnya skala ekonomi suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan jumlah total aset yang dimiliki pemerintah. Penelitian ini

menggunakan variabel ukuran menggunakan logaritma natural dari total aset. Hal ini dikarenakan besarnya total aset masing-masing pemerintah daerah berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Log natural (Ln) dari total aset dapat menghindari adanya data yang tidak normal.

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln (Total Aset)}$$

- b. Kemakmuran (*Wealth*), dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan pengukuran dengan PAD ini karena meskipun kontribusi PAD kecil terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1%-16%), PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto et al., 2010).

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Kemakmuran dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural (Ln) agar tidak terjadi perbedaan data yang terlalu ekstrem, karena besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda.

$$\text{Kemakmuran (Wealth)} = \text{Ln (PAD)}$$

- c. Tingkat Ketergantungan pada pemerintah pusat, dapat diukur dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Pada penelitian ini, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan.

$$\text{Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

- d. *Leverage*, adalah proporsi dana yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi *leverage* maka akan semakin besar ketergantungan entitas pada pihak luar karena semakin besar utang yang dimiliki entitas tersebut maka semakin rendah kinerja keuangan entitas tersebut. Pada penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan *debt to equity*.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$

- e. Belanja daerah, merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada penelitian belanja daerah dengan logaritma natural (Ln) total realisasi belanja daerah agar tidak terjadi perbedaan data yang terlalu ekstrem, karena besarnya total realisasi belanja masing-masing pemerintah daerah berbeda-beda.

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Ln (Total Realisasi Belanja Daerah)}$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 23. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*)

merupakan analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dari hasil uji *Normal P-P Plot* dan uji *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan jika data tidak berdistribusi normal. Namun setelah melalui proses *screening* data, data telah berdistribusi normal dikarenakan nilai *Asymp. sig 2-tailed* menunjukkan angka diatas 0,05.

Uji Multikolinearitas

Nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF pada *Collinearity Statistic* lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas).

Uji Autokorelasi

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi dengan Uji *Durbin-Watson*, yaitu jika pengujian diperoleh nilai *Durbin-Watson* di antara -2 sampai dengan +2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai statistik *Durbin-Watson* = 1,590 (terletak di antara -2 sampai dengan +2). Jadi dapat disimpulkan data tersebut tidak mengandung/bebas dari unsur autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik *Scatterplot*. Berdasarkan grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Persamaan regresi digunakan untuk menjawab hipotesis 1,2,3,4, dan 5 serta untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	,493	,143		3,440	,001
	SIZE	-,008	,008	-,164	-,982	,329
	WLTH	,036	,009	,993	3,768	,000
	TKPP	-,057	,057	-,176	-,996	,322
	LEV	-1,166	,952	-,115	-1,225	,224
	BD	,073	,010	1,225	6,994	,000

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$KKPD = 0,493 - 0,008 \text{ SIZE} + 0,036 \text{ WLTH} - 0,057 \text{ TKPP} - 1,166 \text{ LEV} + 0,073 \text{ BD} + e$$

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Tabel 3
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,029	5	,006	10,471	,000 ^b
	Residual	,045	81	,001		
	Total	,074	86			

a. Dependent Variable: KKPD

b. Predictors: (Constant), BD, LEV, SIZE, TKPP, WLTH

Sumber: Output SPSS

Dari hasil pengujian kelayakan model regresi (*goodness of fit*) yang telah disajikan pada tabel ANOVA diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 10,471 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,627 ^a	,393	,355	,023517

a. Predictors: (Constant), BD, LEV, SIZE, TKPP, WLTH

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Output SPSS

Dari tabel yang disajikan di atas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,355. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai variabel kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja dapat dijelaskan oleh variabel ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, *leverage*, dan belanja daerah sebesar 35,5 persen. Dan sisanya yaitu 64,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Tabel 5
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,493	,143		3,440	,001
	SIZE	-,008	,008	-,164	-,982	,329
	WLTH	,036	,009	,993	3,768	,000
	TKPP	-,057	,057	-,176	-,996	,322
	LEV	-1,166	,952	-,115	-1,225	,224
	BD	,073	,010	1,225	6,994	,000

a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Output SPSS

Hasil pengujian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan bahwa nilai *Sig.* 0,329 > 0,05 dan arah koefisiennya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sehingga dalam penelitian ini H_1 ditolak.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan ukuran suatu daerah yang dalam penelitian ini diprosikan dengan total aset tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional dan memberikan pelayanan publik yang memadai. Seharusnya pemerintah daerah lebih mengutamakan aset yang bernilai produktif misalnya aset tanah lebih digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian lain yaitu penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Saraswati (2014) serta Noviyanti dan Kiswanto (2016) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Nilai *Sig.* dari variabel Kemakmuran (WLTH) yaitu sebesar 0,000. Karena *Sig.* 0,000 < 0,05 dan arah koefisiennya positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemakmuran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sehingga dalam hal ini H_2 diterima.

Hubungan positif atau searah dalam hasil penelitian ini berarti bahwa semakin besar PAD dalam suatu daerah maka tingkat kemakmuran daerah akan semakin tinggi dan kualitas pelayanan publik meningkat. Kualitas pelayanan publik yang tinggi mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut semakin baik. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya dan mencukupi kebutuhannya. Sumarjo (2010) menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi kepada masyarakat. Hal ini berarti ada suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara jumlah PAD yang besar terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Nugroho (2014) dan Saraswati (2014) yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Variabel Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (TKPP) memiliki nilai Sig. sebesar 0,322. Meskipun arah koefisiennya negatif tetapi karena nilai Sig. $0,322 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sehingga dalam penelitian ini, H_3 ditolak.

Hasil penelitian ini mengartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diproksikan dengan total DAU dibandingkan dengan total pendapatan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan yang tidak berpengaruh dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut berakibat pada dana alokasi umum belum dapat digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Terlihat dari lebih besarnya jumlah belanja daerah daripada realisasi pendapatan yang berakibat pada kurangnya efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Saraswati (2014) yang menemukan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Nilai Sig. dari variabel *Leverage* (LEV) sebesar 0,224. Meskipun arah koefisiennya negatif tetapi karena nilai Sig. $0,224 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* secara individu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sehingga dalam penelitian ini H_4 ditolak.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan *leverage* suatu pemerintah daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar hanya memiliki utang yang relatif kecil jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur memiliki dana internal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau utang dari pihak eksternal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Minarsih (2015), Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian dari Sumarjo (2010) yang menemukan hasil yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Variabel Belanja Daerah (BD) memiliki nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai Sig. $0,000 < 0,05$, dan arah koefisiennya positif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sehingga dalam penelitian ini menyatakan bahwa H_5 diterima.

Hubungan positif atau searah dalam hasil ini mengandung arti bahwa semakin banyak belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam realisasi belanjanya telah digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain, belanja daerah yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur telah digunakan sesuai fungsinya yaitu untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan program

pembangunan yang telah dirancang. Pengelolaan belanja daerah secara efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Kiswanto (2016) dan Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja pemerintah daerah sudah direalisasikan untuk penggunaan perbaikan kinerja yang lebih baik. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2014) yang menyatakan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, leverage, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2015.

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, diperoleh simpulan antara lain:

1. Hasil dari pengujian normalitas data ditemukan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas data, sehingga untuk mendapatkan normalitas data peneliti melakukan *screening* terhadap data dengan mendeteksi adanya data outlier. Hasil dari pengujian data outlier menggunakan *Z-Score*, diperoleh hasil bahwa dari 105 unit sampel yang digunakan terdapat 18 sampel data yang menyimpang. Sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 87 unit.
2. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan menggunakan rasio efisiensi kinerja memiliki kinerja yang dapat dikatakan kurang efisien. Hal tersebut dapat dilihat pada sampel yang digunakan untuk data penelitian sebagian besar termasuk dalam kategori kurang efisien. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dianggap belum bijak dalam mengelola APBD.
3. Hasil dari pengujian signifikansi parameter individu (uji t) masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa: (a) H_1 ditolak : Ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, (b) H_2 diterima : Kemakmuran yang diprosikan dengan PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, (c) H_3 ditolak : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, (d) H_4 ditolak : *Leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, (e) H_5 diterima : Belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangannya semaksimal mungkin sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan efisiensi anggaran.

2. Bagi penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan indikator lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang diantaranya rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio aktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Julitawati, E., Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 1(1): 15-29
- Kusumawardani, M. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1(1).
- Lesmana, S. I. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Thesis*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mahsun, M., F. Sulistyowati, dan H. A. Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Minarsih, R. A. 2015. Pengaruh Size, Wealth, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Mustikarini, W. A. dan D. Fitriyanti. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September.
- Nordiawan, D. dan A. Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Noviyanti, N. A. dan Kiswanto. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 5(1).
- Nugroho, R. A. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1. 2010 *Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat*. Jakarta.
- Rachmawati, D. E. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Saraswati, Z. V. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY dan Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Sari, I. P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon* 3(1).
- Sudarsana, H. S. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

- Suhardjanto, D. dan R. R. Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8(1): 1-194.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Surepno. 2013. Pengaruh *Return on Equity (ROE)*, Ukuran (*Size*) dan Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Susanti, A. D. 2010. *Demand Supply* dan Praktik *Social Disclosure* di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
- _____. Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Wenny, C. D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal STIE MDP* 2(1): 39-51.

